E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 652-662
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Efisiensi Anggaran dalam Mendukung Kinerja Organisasi Pemerintah di Balai Diklat Industri Medan

Riahny Giriktha Bangun[1], Erika Revida[2], Sri Rizki Rahmadanti[3], Yenni Putri Waruwu[4]

[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
E-mail: erika@usu.ac.id

Abstrak

Efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi publik karena berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintah menghasilkan keluaran dan manfaat dengan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran dan keterkaitannya dengan kinerja organisasi pada Balai Diklat Industri (BDI) Medan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BDI Medan Tahun 2023, 2024, dan 2025. Analisis dilakukan melalui perbandingan pagu dan realisasi anggaran, capaian output, indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran BDI Medan meningkat dari 88,11% pada 2023 menjadi 99,64% pada 2024 dan 99,83% pada 2025. Pada 2025, berdasarkan metode pengukuran yang digunakan dalam LAKIP, tingkat efisiensi penggunaan anggaran mencapai 13,08% atau 82,71% pada skala 100. Beberapa capaian kinerja juga melampaui target, antara lain program inkubator bisnis yang mencapai 200% dari target dan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan capaian output 126%. Namun, efisiensi anggaran juga menghadapi konsekuensi operasional berupa penundaan beberapa pelaksanaan diklat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi perlu dikaitkan dengan kualitas output, pencapaian target, dan manfaat program. Oleh karena itu, penguatan penganggaran berbasis kinerja, kualitas perencanaan, pengukuran outcome, dan evaluasi manfaat menjadi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

Kata kunci: *efisiensi anggaran, kinerja organisasi, penganggaran berbasis kinerja, administrasi publik, BDI Medan.*

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 652-662
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Budget efficiency is one of the important aspects in the implementation of public administration because it relates to the ability of government organizations to produce outputs and benefits using the available resources. This study aims to analyze budget efficiency and its relationship with organizational performance at the Industrial Training Center (Balai Diklat Industri/BDI) Medan. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data in the form of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of BDI Medan for the years 2023, 2024, and 2025. The analysis was conducted by comparing budget allocations and actual expenditures, output achievements, performance indicators, and the efficiency of budget utilization. The results show that the budget realization of BDI Medan increased from 88.11% in 2023 to 99.64% in 2024 and 99.83% in 2025. In 2025, based on the measurement method applied in the LAKIP, the level of budget utilization efficiency reached 13.08% or 82.71% on a 100-point scale. Several performance achievements exceeded the established targets, including the business incubator program, which achieved 200% of its target, and the vocational education and training program, which achieved 126% of its output target. However, budget efficiency also resulted in operational consequences, including the postponement of several training activities due to budget efficiency policies. These findings indicate that budget efficiency should not be assessed solely based on the level of budget absorption but must also be linked to output quality, target achievement, and program benefits. Therefore, strengthening performance-based budgeting, improving planning quality, measuring outcomes, and evaluating program benefits are essential to enhancing the performance of government organizations.

Keywords: *budget efficiency, organizational performance, performance-based budgeting, public administration, BDI Medan.*

LATAR BELAKANG

Anggaran dalam organisasi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui anggaran, pemerintah menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Oleh sebab itu, kualitas pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak dapat hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa organisasi telah bekerja secara efisien apabila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target atau manfaat program belum optimal. Sebaliknya, realisasi anggaran yang lebih rendah dapat menunjukkan efisiensi apabila organisasi tetap mampu mencapai atau melampaui target output dan outcome yang

ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja.

Balai Diklat Industri (BDI) Medan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dalam pengembangan sumber daya manusia industri melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan wirausaha melalui program inkubator bisnis. Karakteristik kegiatan tersebut membuat pengelolaan anggaran memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian kinerja organisasi, karena sumber daya yang dialokasikan harus mampu menghasilkan peserta pelatihan yang kompeten, tenaga kerja yang terserap, serta wirausaha baru yang berkembang.

Data LAKIP BDI Medan menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar dalam pagu dan realisasi anggaran selama periode 2023–2025. Pada 2023, pagu anggaran tercatat sekitar Rp29,26 miliar dengan realisasi Rp25,78 miliar atau 88,11%. Pada 2024, pagu turun menjadi sekitar Rp20,39 miliar dengan realisasi sekitar Rp20,31 miliar atau 99,64%. Selanjutnya pada 2025, pagu kembali turun menjadi sekitar Rp7,72 miliar dengan realisasi sekitar Rp7,71 miliar atau 99,83%.

Perubahan tersebut menarik untuk dikaji karena peningkatan persentase penyerapan anggaran tidak selalu identik dengan peningkatan volume kegiatan. Pada 2025, misalnya, BDI Medan mampu mencapai berbagai target kinerja meskipun pagu anggarannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program pendidikan dan pelatihan vokasi mencatat capaian output sebesar 126%, sedangkan fasilitasi dan pembinaan start up mencapai 200%.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 juga menyebabkan penundaan pelaksanaan beberapa angkatan diklat. LAKIP mencatat adanya penundaan pelaksanaan diklat angkatan kedua dan ketiga serta keterlambatan jadwal akibat penyesuaian kebijakan BPSDMI. BDI Medan kemudian melakukan akselerasi pelaksanaan pada triwulan IV melalui optimalisasi perencanaan dan penguatan kolaborasi dengan industri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan penting dalam pengelolaan organisasi publik, yaitu bagaimana mencapai efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efisiensi yang hanya berorientasi pada pengurangan belanja berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan program. Sebaliknya, pengeluaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa efisiensi anggaran harus dipahami sebagai kemampuan organisasi menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai output dan hasil yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan data LAKIP BDI Medan Tahun 2023–2025, penelitian ini berupaya melihat perkembangan realisasi anggaran, capaian output, serta hubungan antara efisiensi penggunaan anggaran dengan kinerja organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan kondisi efisiensi anggaran serta kinerja organisasi berdasarkan dokumen kinerja yang tersedia. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, sehingga istilah "mendukung" dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja berdasarkan data dokumenter. Sumber utama penelitian ini adalah LAKIP BDI Medan Tahun 2023, LAKIP BDI Medan Tahun 2024, dan LAKIP BDI Medan Tahun 2025. Data yang dianalisis meliputi pagu anggaran, realisasi anggaran, persentase penyerapan, capaian output, indikator kinerja, tingkat efisiensi penggunaan anggaran, capaian SAKIP, serta informasi mengenai kendala dan kebijakan efisiensi.

Sebagai bahan konseptual dan regulatif, penelitian ini juga menggunakan literatur mengenai penganggaran berbasis kinerja dan evaluasi kinerja anggaran serta regulasi Kementerian Keuangan terkait evaluasi kinerja anggaran. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi data anggaran dan kinerja dari LAKIP Tahun 2023–2025, membandingkan pagu dan realisasi anggaran untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran, membandingkan realisasi anggaran dengan capaian output dan indikator kinerja, menganalisis tingkat efisiensi berdasarkan perhitungan yang digunakan BDI Medan pada LAKIP Tahun 2025, serta melakukan interpretasi terhadap hubungan antara efisiensi anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya, analisis dilakukan secara komparatif untuk melihat perubahan dan perkembangan efisiensi anggaran serta kinerja organisasi dari tahun ke tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Anggaran BDI Medan Tahun 2023–2025

Perkembangan anggaran BDI Medan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan selama periode penelitian.

Tabel 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran BDI Medan 2023–2025

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
2023	Rp. 29.263.406.000	Rp. 25.782.949.462	88,11%
2024	Rp. 20.385.939.000	Rp. 20.312.326.000	99,64%
2025	Rp. 7.721.786.000	Rp. 7.708.423.000	99,83%

Sumber: LAKIP BDI Medan 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa pagu anggaran mengalami penurunan dari sekitar Rp29,26 miliar pada 2023 menjadi Rp20,39 miliar pada 2024 dan sekitar Rp7,72 miliar pada 2025. Meskipun demikian, persentase realisasi justru mengalami peningkatan dari 88,11% menjadi 99,64% dan kemudian 99,83%.

Dengan demikian, terdapat dua fenomena yang perlu dibedakan. Pertama, terjadi peningkatan kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran yang tersedia. Kedua, peningkatan penyerapan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan nominal anggaran yang tersedia.

LAKIP BDI Medan menyebutkan bahwa capaian 2025 merupakan capaian penyerapan anggaran tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 99,83%.

Namun, tingginya penyerapan tidak dapat secara otomatis diinterpretasikan sebagai peningkatan efisiensi. Efisiensi harus dianalisis dengan memperhatikan output yang dihasilkan.

Efisiensi Anggaran pada Tahun 2023

Data LAKIP 2023 menunjukkan bahwa realisasi anggaran BDI Medan secara keseluruhan sebesar Rp25,78 miliar atau 88,11% dari pagu. Dalam pelaksanaan diklat 3in1, BDI Medan merealisasikan anggaran sebesar Rp17,08 miliar untuk menghasilkan 3.350 output. Berdasarkan perhitungan internal dalam LAKIP, biaya rata-rata per capaian output sebesar sekitar Rp5,10 juta. Angka tersebut berada di bawah indeks yang digunakan BDI Medan sebesar Rp6,5 juta per capaian output.

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa efisiensi tidak hanya dapat dilihat melalui persentase penyerapan anggaran. Dalam kasus diklat 3in1, organisasi membandingkan biaya dengan jumlah output yang dihasilkan. Menariknya, jumlah output 2023 juga meningkat dibandingkan 2022. Pada 2022, realisasi anggaran kegiatan diklat yang dianalisis mencapai sekitar Rp10,04 miliar dengan 2.140 output atau sekitar Rp4,69 juta per output.

Dengan demikian, pada 2023 biaya per output meningkat dibandingkan 2022, tetapi masih berada di bawah indeks yang ditetapkan dalam analisis LAKIP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi perlu dilihat secara relatif terhadap standar biaya/output yang digunakan organisasi, bukan semata-mata dibandingkan antarperiode.

Efisiensi dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Pada 2024, pagu anggaran BDI Medan sekitar Rp20,39 miliar dengan realisasi sekitar Rp20,31 miliar atau 99,64%. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penyerapan anggaran dibandingkan 2023. Peningkatan penyerapan ini perlu dilihat bersama dengan capaian kinerja. Dalam rangkaian data jangka menengah yang disajikan dalam LAKIP 2025, nilai SAKIP BDI Medan pada 2024 mencapai 75,25 dari target 72 atau 104,51%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada 2024 peningkatan penyerapan anggaran berjalan bersama dengan peningkatan nilai realisasi SAKIP. Meskipun demikian, hubungan tersebut belum dapat disebut sebagai hubungan kausal karena penelitian ini tidak menggunakan desain penelitian yang menguji pengaruh secara statistik.

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting dalam penelitian karena LAKIP BDI Medan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran secara khusus. LAKIP menggunakan rumus:

ERO = [((AARO × CRO) – RARO) / AARO] × 100%

Keterangan:
ERO = Efisiensi Rincian Output;
AARO = Alokasi Anggaran Rincian Output;
RARO = Realisasi Anggaran Rincian Output;
CRO = Capaian Rincian Output.

Rumus tersebut digunakan BDI Medan untuk menghubungkan alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan capaian output. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total efisiensi penggunaan anggaran BDI Medan Tahun 2025 sebesar **13,08%**, dengan nilai efisiensi pada skala 100 sebesar **82,71%**.

Tabel 2. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Tahun 2025

Rincian Output	Capaian Output	Alokasi	Realisasi	Efisiensi
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	126%	Rp. 1.128.000.000	Rp. 1.124.913.127	26,10%
Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	100%	Rp. 40.000.000	Rp. 39.827.290	0,43%
Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	200%	Rp. 100.000.000	Rp. 99.871.289	100,13%
Pelatihan Bidang Industri	103%	Rp. 988.000.000	Rp. 985.214.548	3,57%
Program Dukungan Manajemen	100%	Rp. 6.593.786.000	Rp. 6.583.509.495	0,16%
Total	113%	Rp. 7.721.786.000	Rp. 7.708.422.622	13,08%

Sumber: LAKIP BDI Medan Tahun 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi tidak seragam pada setiap rincian output. Efisiensi tertinggi terdapat pada Fasilitasi dan Pembinaan Start Up, yaitu 100,13%. Hal tersebut berkaitan dengan capaian output sebesar 200% dari target. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi juga memiliki efisiensi sebesar 26,10% dengan capaian output 126%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa capaian output memiliki peran penting dalam perhitungan efisiensi. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya memperoleh nilai efisiensi karena membelanjakan anggaran lebih rendah dari alokasi, tetapi juga karena mampu menghasilkan output di atas target.

Efisiensi Anggaran Tidak Identik dengan Penyerapan Anggaran

Salah satu temuan utama penelitian adalah adanya perbedaan antara konsep penyerapan anggaran dan efisiensi anggaran. Penyerapan anggaran menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pagu. Sementara itu, efisiensi mempertimbangkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan output yang dihasilkan.

Perbandingan tiga tahun memperlihatkan kondisi berikut:
2023: realisasi 88,11%;
2024: realisasi 99,64%;
2025: realisasi 99,83%.

Jika hanya menggunakan indikator penyerapan, maka 2025 terlihat sebagai periode dengan kinerja anggaran paling tinggi. LAKIP sendiri menyatakan bahwa penyerapan 2025 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, analisis efisiensi memberikan informasi yang lebih mendalam. Pada 2025, total capaian output mencapai 113%, sementara efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,08%. Artinya, terdapat indikasi bahwa peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tidak semata-mata berasal dari kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan target.

Dalam perspektif administrasi publik, kondisi tersebut lebih mendekati prinsip value for money, yaitu melihat bagaimana sumber daya publik dikonversi menjadi hasil yang memberikan nilai bagi masyarakat dan organisasi.

Anggaran Lebih Kecil Tidak Berarti Kinerja Organisasi Menurun

Fenomena menarik lainnya adalah penurunan pagu anggaran yang sangat signifikan pada 2025. Pagu turun dari Rp20,39 miliar pada 2024 menjadi Rp7,72 miliar pada 2025. Namun, realisasi anggaran meningkat secara persentase dari 99,64% menjadi 99,83%. Pada saat yang sama, sejumlah indikator kinerja tetap mencapai bahkan melampaui target. Salah satu contohnya adalah program inkubator bisnis. Pada 2025 target wirausaha baru hasil inkubator adalah dua tenant, sedangkan realisasi mencapai empat tenant atau 200%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya anggaran tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai kinerja organisasi.

Kemampuan organisasi mengoptimalkan sumber daya, membangun kerja sama, meningkatkan perencanaan, serta memilih prioritas kegiatan menjadi faktor penting. LAKIP juga menunjukkan bahwa BDI Medan menggunakan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama industri dan lembaga sertifikasi, untuk mendukung program pengembangan SDM industri. Dengan demikian, penguatan kolaborasi eksternal dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme organisasi dalam mengoptimalkan keterbatasan sumber daya internal.

Efisiensi dan Pencapaian Kinerja Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi utama BDI Medan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran perlu dilihat dari kemampuan anggaran menghasilkan peserta pelatihan dan lulusan yang kompeten. Pada 2023, BDI Medan menghasilkan 3.350 output diklat 3in1 dengan realisasi anggaran sekitar Rp17,08 miliar. Biaya per output dihitung sekitar Rp5,10 juta dan masih berada di bawah indeks Rp6,5 juta per output yang digunakan dalam analisis LAKIP.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan biaya per output dapat membantu organisasi melihat efisiensi secara lebih operasional. Namun, ukuran tersebut memiliki

keterbatasan. Biaya per peserta tidak dapat sepenuhnya menggambarkan manfaat program. Dua program pelatihan dengan biaya per peserta yang sama dapat menghasilkan manfaat yang berbeda apabila kualitas kompetensi, tingkat penempatan kerja, atau relevansi kompetensinya berbeda. Karena itu, pengukuran efisiensi BDI Medan ke depan perlu dikembangkan dari sekadar biaya per output menuju biaya per outcome, misalnya biaya per lulusan yang kompeten, biaya per lulusan yang bekerja, atau biaya per tenant yang berkembang.

Efisiensi dan Program Inkubator Bisnis

Program inkubator bisnis menunjukkan contoh yang menarik mengenai hubungan antara penggunaan anggaran dan output. Pada 2025, target tenant yang ditetapkan adalah dua, sedangkan realisasi mencapai empat tenant atau 200%. Efisiensi pada rincian output fasilitasi dan pembinaan start up mencapai 100,13%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program mampu menghasilkan output lebih besar daripada target dengan realisasi anggaran yang relatif sesuai dengan alokasi.

Namun demikian, ukuran keberhasilan program inkubator tidak seharusnya berhenti pada jumlah tenant. Dalam perspektif kinerja organisasi, manfaat yang lebih penting adalah keberlanjutan usaha tenant, peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, serta kemampuan usaha untuk bertahan setelah program berakhir.

Oleh karena itu, BDI Medan dapat memperluas indikator evaluasi inkubator dari indikator output menuju indikator outcome dan impact.

Efisiensi dan SAKIP

Kinerja organisasi tidak hanya tercermin dari program utama, tetapi juga dari kualitas manajemen pemerintahan. Data BDI Medan menunjukkan bahwa nilai SAKIP meningkat dari 71,10 pada 2022 menjadi 72,40 pada 2023, 75,25 pada 2024, dan 79,35 pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kualitas akuntabilitas kinerja secara nilai absolut. Namun, capaian terhadap target pada 2025 sebesar 99,87%, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 104,51%. LAKIP menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya kelemahan dalam kualitas penerapan SAKIP yang perlu disempurnakan.

Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa peningkatan efisiensi anggaran harus diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen kinerja. Penghematan anggaran tanpa perbaikan sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, efisiensi harus ditempatkan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja.

Konsekuensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran tidak selalu menghasilkan dampak positif apabila diterapkan hanya melalui pembatasan atau pengurangan kegiatan. LAKIP 2025 secara eksplisit mencatat bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penundaan pelaksanaan diklat pada angkatan kedua dan ketiga. BDI Medan kemudian melakukan akselerasi

pelaksanaan pada triwulan IV melalui optimalisasi perencanaan dan penguatan kolaborasi industri.

Temuan tersebut menunjukkan adanya trade-off dalam penerapan efisiensi. Di satu sisi, efisiensi diperlukan untuk memastikan sumber daya publik digunakan secara optimal. Di sisi lain, pengurangan atau penundaan kegiatan dapat berdampak terhadap volume layanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi perlu mempertimbangkan tingkat prioritas kegiatan. Program yang berhubungan langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama perlu mendapatkan perlindungan anggaran yang memadai, sedangkan penghematan dapat lebih diarahkan pada aktivitas pendukung yang memiliki ruang untuk dioptimalkan.

Efisiensi Anggaran sebagai Instrumen, Bukan Tujuan Akhir

Berdasarkan keseluruhan temuan, efisiensi anggaran seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir organisasi. Tujuan utama organisasi pemerintah adalah menghasilkan pelayanan dan manfaat publik sesuai mandat yang diberikan. Efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Apabila organisasi hanya berorientasi pada penyerapan rendah, terdapat risiko bahwa kegiatan yang sebenarnya penting justru tidak terlaksana. Sebaliknya, apabila organisasi hanya berorientasi pada penyerapan tinggi, terdapat risiko anggaran dibelanjakan tanpa memperhatikan kualitas output.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran BDI Medan sebaiknya mencakup setidaknya empat dimensi:

1. Ekonomi, yaitu memperoleh input dengan biaya yang wajar;
2. Efisiensi, yaitu mengoptimalkan hubungan input dan output;
3. Efektivitas, yaitu mencapai target organisasi;
4. Manfaat, yaitu menghasilkan perubahan atau manfaat yang relevan bagi penerima layanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan evaluasi kinerja anggaran yang menempatkan aspek implementasi dan manfaat sebagai bagian penting dari evaluasi kinerja anggaran.

Implikasi Administrasi Publik

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi terhadap praktik administrasi publik. Pertama, perencanaan anggaran perlu semakin berbasis kinerja. Penyusunan anggaran seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan belanja, tetapi juga target output dan outcome yang ingin dicapai. Kedua, indikator kinerja perlu dikembangkan dari output menuju outcome. Jumlah peserta pelatihan merupakan indikator output, tetapi tingkat kompetensi, penyerapan kerja, dan relevansi kompetensi dengan kebutuhan industri merupakan indikator yang lebih dekat dengan manfaat program. Ketiga, efisiensi harus dianalisis secara programatik. Efisiensi total organisasi belum tentu menunjukkan bahwa seluruh program telah efisien. Data 2025 menunjukkan adanya perbedaan efisiensi antar-rincian output.

Keempat, kebijakan efisiensi perlu mempertimbangkan risiko pelayanan. Penundaan diklat akibat efisiensi menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan belanja dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program utama. Kelima, digitalisasi dan kolaborasi dapat menjadi strategi efisiensi. LAKIP 2025 mencatat inovasi berupa aplikasi pemeliharaan BMN dan penggunaan chatbot AI untuk mendukung pelayanan serta promosi BDI Medan. Keenam, evaluasi anggaran perlu menjadi bagian dari pengambilan keputusan organisasi. Data SAKIP dan LAKIP tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran di BDI Medan selama periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari kemampuan organisasi merealisasikan anggaran dan mencapai target output. Realisasi anggaran meningkat dari 88,11% pada 2023 menjadi 99,64% pada 2024 dan 99,83% pada 2025. Pada 2025, pagu anggaran sebesar sekitar Rp7,72 miliar direalisasikan sebesar sekitar Rp7,71 miliar.

Analisis efisiensi yang digunakan dalam LAKIP 2025 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 13,08% atau 82,71% pada skala 100. Pada beberapa rincian output, capaian bahkan melebihi target, seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 126% dan Fasilitasi dan Pembinaan Start Up sebesar 200%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak selalu menyebabkan penurunan kinerja organisasi. BDI Medan tetap mampu mencapai berbagai target kinerja melalui optimalisasi sumber daya, perencanaan, dan kolaborasi. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya konsekuensi dari kebijakan efisiensi berupa penundaan beberapa kegiatan diklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi kualitas dan cakupan layanan utama organisasi.

Dengan demikian, efisiensi anggaran perlu dipahami bukan sebagai upaya mengurangi pengeluaran semata, melainkan sebagai proses optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan output dan manfaat publik yang lebih besar. Dalam konteks BDI Medan, efisiensi akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan peningkatan kompetensi SDM industri, penempatan kerja lulusan, keberlanjutan tenant inkubator, dan manfaat program bagi sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Diklat Industri Medan. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Diklat Industri Medan Tahun 2023*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Balai Diklat Industri Medan. (2025a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Diklat Industri Medan Tahun 2024*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Balai Diklat Industri Medan. (2025b). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.

Kurnia, A. S. (2017). Model pengukuran kinerja dan efisiensi sektor publik dengan metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Bisnis Strategi, 15*(1), 50–69.

Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 5*(1).

Rosa, H. T., & Bhilawa, L. (2026). Does financial efficiency reflect government performance? Evidence from Indonesian provinces. *Accounting Analysis Journal, 14*(3).